

BAB II

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS

2.1. Kajian Pustaka

2.1.1. Laporan Keuangan

2.1.1.1. Pengertian Laporan Keuangan

Menurut Standar Akuntansi Keuangan (SAK) tahun 2018 oleh IAI, Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada mereka. Sedangkan menurut Hery (2016:63) menjelaskan pengertian laporan keuangan sebagai berikut :

“Laporan keuangan pada dasarnya adalah hasil proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat untuk mengkomunikasikan data keuangan atau aktivitas perusahaan kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Dengan kata lain, laporan keuangan ini berfungsi sebagai alat informasi yang menghubungkan perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan, yang menunjukkan kondisi kesehatan keuangan perusahaan dan kinerja perusahaan.”

Menurut Kasmir (2023:7), Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Werner R. Murhadi (2019:1) menjelaskan laporan keuangan adalah :

“laporan keuangan merupakan bahasa bisnis. Di dalam laporan keuangan berisi informasi mengenai kondisi keuangan perusahaan kepada pihak pengguna. Dengan memahami laporan keuangan suatu perusahaan, maka

berbagai pihak yang berkepentingan dapat melihat kondisi kesehatan keuangan suatu perusahaan.”

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diinterpretasikan bahwa laporan keuangan merupakan sebuah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan yang disajikan sebagai alat komunikasi yang menghubungkan antara perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan untuk melihat kondisi kesehatan suatu perusahaan.

2.1.1.2. Tujuan Laporan Keuangan

Menurut Kasmir (2023:11), mengungkapkan bahwa tujuan laporan keuangan adalah sebagai berikut :

1. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva (aset yang dimiliki perusahaan pada saat itu);
2. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat itu;
3. Memberikan informasi tentang jenis dan jumlah pendapatan yang diperoleh perusahaan pada periode tertentu;
4. Memberikan informasi tentang jumlah biaya dan jenis biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode tertentu;
5. Memberikan informasi tentang perubahan-perubahan yang terjadi terhadap aktiva, pasiva, dan modal perusahaan;
6. Memberikan informasi tentang kinerja manajemen perusahaan dalam suatu periode;

7. Memberikan informasi tentang catatan-catatan atas laporan keuangan.

Sedangkan menurut *International Accounting Standards Board* (2018), tujuan dari laporan keuangan adalah menampilkan kondisi keuangan suatu perusahaan terkait asset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, dan pengeluaran dengan harapan dapat bermanfaat bagi pengguna laporan keuangan.

2.1.1.3. Karakteristik Laporan Keuangan

Menurut PSAK Nomor 1 tentang Penyajian Laporan Keuangan Paragraf 15-46 (2015:5-9), terdapat empat karakteristik laporan keuangan yaitu sebagai berikut :

1. Dapat Dipahami

Kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu.

2. Relevan

Agar bermanfaat, informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki

kualitas relevan jika dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini atau masa depan, menegaskan, atau mengkoreksi, hasil evaluasi mereka di masa lalu.

a. Materialitas

Informasi di pandang material jika kelalaian untuk dalam mencatat informasi tersebut dapat mempengaruhi keputusan ekonomi pengguna yang diambil atas dasar laporan keuangan. Materialitas tergantung pada besarnya pos atau kesalahan yang dinilai sesuai dengan situasi khusus dari kelalaian dalam mencantumkan (*omission*) atau kesalahan mencatat (*misstatement*). Karenanya, materialitas lebih merupakan suatu ambang batas atau titik pemisah dari pada suatu karakteristik kualitatif pokok yang harus dimiliki agar informasi dipandang berguna.

b. Relevansi informasi dipengaruhi oleh hakikat dan materialitasnya.

Dalam beberapa kasus, hakikat informasi saja sudah cukup untuk menentukan relevansinya.

3. Keandalan

Agar bermanfaat, informasi yang disajikan dalam laporan keuangan harus andal. Informasi akan memiliki kualitas yang andal jika bebas dari kesalahan material dan bias, serta menyajikan secara jujur apa yang

seharusnya di sajikan atau yang secara wajar di harapkan dapat disajikan.

a. Penyajian jujur

Agar dapat diandalkan, informasi harus menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Substansi Mengungguli Bentuk

Jika informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka peristiwa tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi dan bukan hanya bentuk hukum.

c. Netralitas

Informasi harus diarahkan pada kebutuhan umum pemakai, dan tidak bergantung pada kebutuhan dan keinginan pihak tertentu. Tidak boleh ada usaha untuk menyajikan informasi yang menguntungkan beberapa pihak, sementara hal tersebut akan merugikan pihak lain yang mempunyai kepentingan yang berlawanan.

d. Pertimbangan Sehat

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aktiva atau penghasilan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban atau beban tidak dinyatakan terlalu rendah.

e. Kelengkapan

Agar dapat diandalkan, informasi dalam laporan keuangan harus lengkap dalam batasan materialitas dan biaya. Kesengajaan untuk tidak mengungkapkan (*omission*) mengakibatkan informasi menjadi tidak benar atau menyesatkan dan karena itu tidak dapat diandalkan dan tidak sempurna ditinjau dari segi relevansi.

4. Dapat Dibandingkan

Pengguna harus dapat membandingkan laporan keuangan entitas antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pengguna juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar entitas untuk mengevaluasi posisi keuangan, kinerja, serta perubahan posisi keuangan secara relatif. Keandalan informasi yang relevan dan andal ialah sebagai berikut :

a. Tepat Waktu

Jika terdapat penundaan yang tidak semestinya dalam pelaporan, maka informasi yang dihasilkan akan kehilangan relevansinya. Manajemen mungkin perlu menyeimbangkan manfaat relatif antara pelaporan tepat waktu dan ketentuan informasi andal. Untuk menyediakan informasi tepat waktu, seringkali perlu melaporkan sebelum seluruh aspek transaksi atau peristiwa lainnya diketahui, sehingga mengurangi keandalan informasi.

b. Keseimbangan antara Biaya dan Manfaat

Keseimbangan antara biaya dan manfaat lebih merupakan kendala yang pervasif daripada karakteristik kualitatif. Manfaat yang dihasilkan informasi seharusnya melebihi biaya penyusunannya. Namun demikian, evaluasi biaya dan manfaat merupakan proses pertimbangan yang substansial.

c. Keseimbangan di antara Karakteristik Kualitatif

Keseimbangan atau trade-off di antara berbagai karakteristik kualitatif sering diperlukan. Pada umumnya tujuannya adalah untuk mencapai suatu keseimbangan yang tepat di antara berbagai karakteristik untuk memenuhi tujuan laporan keuangan. Kepentingan relatif dari berbagai karakteristik dalam berbagai kasus yang berbeda merupakan masalah pertimbangan profesional.

d. Penyajian Wajar

Laporan keuangan sering dianggap menggambarkan pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, posisi keuangan, kinerja serta perubahan posisi keuangan suatu perusahaan. Meskipun kerangka dasar ini tidak menangani secara langsung konsep tersebut, penerapan karakteristik kualitatif pokok dan standar akuntansi keuangan yang sesuai biasanya menghasilkan laporan keuangan yang menggambarkan apa yang pada umumnya dipahami sebagai suatu

pandangan yang wajar dari, atau menyajikan dengan wajar, informasi semacam itu.

2.1.2. *Leverage*

2.1.2.1. Pengertian *Leverage*

Menurut Kasmir (2023:151) menyatakan bahwa *leverage* merupakan :

“...rasio yang digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai dengan utang. Artinya berapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dibandingkan dengan aktivasnya. Dalam arti luas dikatakan bahwa rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan.”

Sedangkan *leverage* menurut Apriliani dan Abdurrahman (2023)

menyatakan bahwa *leverage* adalah rasio yang menilai kapasitas industri untuk memenuhi kewajibannya, apakah berjangka panjang ataupun berjangka pendek, dengan membandingkan ekuitasnya. Menurut Agustia (2013) dalam Yovianti (2020) menyatakan bahwa :

“*Leverage* mencerminkan sumber dana operasi yang digunakan oleh perusahaan. *Leverage* juga menunjukkan risiko yang dihadapi perusahaan. Makin besar risiko yang dihadapi perusahaan maka ketidakpastian untuk menghasilkan laba di masa depan juga akan meningkat.”

Berdasarkan beberapa penjelasan mengenai pengertian *leverage* dapat disimpulkan bahwa *leverage* merupakan gambaran suatu entitas dalam melunasi semua utangnya baik jangka pendek maupun jangka panjang. Hal ini sangat penting bagi seorang kreditur dalam memilih perusahaan sebelum meminjamkan dananya. Rasio *leverage* ini mengukur seberapa mampu perusahaan dalam memenuhi kewajibannya terhadap pembiayaan perusahaan.

2.1.2.2. Tujuan dan Manfaat Leverage

Menurut Kasmir (2023:153) tujuan perusahaan dengan menggunakan rasio *leverage* adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak ketiga (kreditur).
2. Untuk menilai kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menilai keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menilai seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menilai seberapa besar pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menilai atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menilai berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan tujuan lainnya.

Sementara itu, menurut Kasmir (2023:154) manfaat *leverage* adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis kemampuan posisi perusahaan terhadap kewajiban kepada pihak lainnya.

2. Untuk menganalisis kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban yang bersifat tetap (seperti angsuran pinjaman termasuk bunga).
3. Untuk menganalisis keseimbangan antara nilai aktiva khususnya aktiva tetap dengan modal.
4. Untuk menganalisis seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang.
5. Untuk menganalisis seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan aktiva.
6. Untuk menganalisis atau mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang.
7. Untuk menganalisis berapa dana pinjaman yang segera akan ditagih, terdapat sekian kalinya modal sendiri yang dimiliki, dan tujuan lainnya.

2.1.2.3. Metode Pengukuran Leverage

Menurut Kasmir (2023:157) dalam praktiknya, terdapat beberapa jenis pengukuran rasio *leverage* yang sering digunakan perusahaan. Adapun jenis-jenis metode pengukuran rasio *leverage* adalah sebagai berikut :

1. *Debt to Asset Ratio*

Debt to Asset Ratio merupakan rasio utang yang digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aktiva. Dengan kata lain, seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang atau seberapa besar utang perusahaan berpengaruh terhadap pengelolaan

aktiva. Dari hasil pengukuran, apabila rasionya tinggi, artinya pendanaan dengan utang semakin banyak, maka semakin sulit perusahaan untuk memperoleh tambahan pinjaman karena dikhawatirkan perusahaan tidak mampu menutupi utang-utangnya dengan aktiva yang dimilikinya. Demikian pula apabila rasionya rendah, semakin kecil perusahaan dibiayai dengan utang. Standar pengukuran untuk menilai baik tidaknya rasio perusahaan, digunakan rasio rata-rata industri yang sejenis.

Rumus untuk mencari *debt to asset ratio* adalah sebagai berikut :

$$Debt\ to\ Asset\ Ratio = \frac{Total\ Debt}{Total\ Aset} \times 100\%$$

2. *Debt to Equity Ratio*

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang. Semakin tinggi rasio ini akan menunjukkan kinerja yang tidak baik bagi perusahaan. Maka dari itu, perusahaan harus berusaha agar DER bernilai rendah atau berada dibawah standar industry yaitu 80%. DER untuk setiap perusahaan tentu berbeda-beda, tergantung

karakteristik bisnis dan keberagaman arus kasnya. Perusahaan dengan arus kas yang stabil biasanya memiliki rasio yang lebih tinggi dari rasio kas yang kurang stabil.

Rumus untuk mencari *Debt to Equity Ratio* adalah sebagai berikut :

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

3. *Long-term Debt to Equity Ratio (LTDtER)*

Rasio ini merupakan rasio antara utang jangka panjang dengan modal sendiri. Tujuannya adalah untuk mengukur berapa bagian dari setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan jaminan utang jangka panjang dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yang disediakan oleh perusahaan.

Rumus untuk mencari *long-term debt to equity ratio* adalah dengan menggunakan perbandingan antara utang jangka panjang dengan modal sendiri yaitu sebagai berikut :

$$\text{LTDtER} = \frac{\text{Total Term Debt}}{\text{Equity}} \times 100\%$$

4. *Time Interest Earned Ratio*

Menurut J. Fred Weston dalam Kasmir (2023:160), *Times Interest Earned* merupakan rasio untuk mencari jumlah kali perolehan bunga. Rasio ini diartikan oleh James C. Van Horne juga sebagai kemampuan perusahaan untuk membayar biaya bunga, sama seperti *coverage ratio*.

Secara umum, semakin tinggi rasio ini akan semakin besar kemungkinan perusahaan dapat membayar pinjaman dan dapat menjadi ukuran untuk memperoleh tambahan pinjaman baru dari kreditur. Demikian pula sebaliknya, apabila rasio ini rendah, semakin kecil juga kemampuan perusahaan untuk membayar bunga dan biaya lainnya. Untuk mengukur rasio ini, digunakan perbandingan antara laba sebelum bunga dan pajak dibandingkan biaya bunga yang dikeluarkan. Dengan demikian, kemampuan perusahaan untuk membayar bunga pinjaman tidak dipengaruhi oleh pajak.

Rumus untuk *time interest earned ratio* dapat digunakan cara sebagai berikut :

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

Atau

$$\text{Time Interest Earned Ratio} = \frac{\text{EBIT} + \text{Biaya Bunga}}{\text{Biaya Bunga (Interest)}}$$

5. *Fix Charge Coverage* (FCC)

Fix Charge Coverage atau lingkup biaya tetap merupakan rasio yang menyerupai *Time Interest Earned Ratio*. Hanya saja perbedaannya adalah rasio ini dilakukan apabila perusahaan memperoleh utang jangka panjang atau menyewa aktiva berdasarkan kontrak sewa (*lease*

contract). Biaya tetap merupakan biaya bunga ditambah kewajiban sewa tahunan atau jangka panjang.

Rumus untuk mencari *Fix Charge Coverage* (FCC) adalah sebagai berikut :

$$FCC = \frac{EBT + \text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/lease}}{\text{Biaya Bunga} + \text{Kewajiban Sewa/lease}}$$

Pada penelitian ini, penulis menggunakan rasio *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk mengukur *leverage* perusahaan sub-sektor perbankan. Hal ini karena rasio ini dapat menjadi gambaran perbandingan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini juga sekaligus dapat menilai seberapa efektif manajemen suatu perusahaan dalam memaksimalkan sumber pendanaan dan mengelola risiko untuk menghasilkan pertumbuhan serta menghindari dari potensi kebangkrutan. Suatu organisasi dengan utang yang besar sering dianggap memiliki sedikit kapasitas pembiayaan yang baru (Dani et.,al, 2013). Dengan demikian, rasio utang yang tinggi dapat mempersulit pembiayaan di masa depan sehingga manajemen dapat memanipulasi laporan keuangan untuk memenuhi batasan kebutuhan tersebut. Adanya hal tersebut dapat memungkinkan terjadinya kecurangan oleh pihak manajemen dengan cara memanipulasi laporan keuangan agar tetap mendapatkan pendanaan dari para kreditur atau para pemegang saham.

2.1.3. *Good Corporate Governance*

2.1.3.1. *Pengertian Good Corporate Governance*

Pengertian *corporate governance* menurut Turnbull Report (1999) dalam Effendi (2016:2) menyatakan :

“Corporate governance is a company’s system of internal control has it’s principal aim the management of risk that are significant of the fulfilment of its business objectivities, with a view to safeguarding the company’s assets and enhancing over time the value of the shareholders investment.”.

Berdasarkan definisi diatas *corporate governance* adalah suatu sistem yang mengatur mengenai pengendalian internal perusahaan tentunya yang mengelola risiko signifikan yang berfungsi memenuhi tujuan perusahaan melalui memproteksi aset perusahaan serta mengoptimalkan nilai investasi para pemegang saham dalam jangka waktu yang lama.

Sedangkan, menurut Bank Dunia (*World Bank*) mendefinisikan *Good Corporate Governance* ialah kumpulan hukum, peraturan, dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi, yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan untuk berfungsi secara efisien guna menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkelanjutan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan. Menurut *Forum Corporate Governance on Indonesia* (FCGI), *Corporate Governance* ialah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus dan pengelola perusahaan, pihak kreditor, pemerintah, karyawan, serta pemangku kepentingan eksternal dan internal lainnya yang berkaitan

dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau suatu sistem yang mengendalikan perusahaan.

Berdasarkan definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* adalah seperangkat aturan atau peraturan yang mengatur hubungan antara hak dan kewajiban para pihak dalam perusahaan dalam rangka mencapai tujuan perusahaan, terutama kepentingan pemegang saham.

2.1.3.2. Tujuan *Good Corporate Governance*

Menurut Sudarmanto et al., (2021:29) *Good Corporate Governance* memberikan acuan dalam pengawasan yang berfungsi untuk efektivitas pelaksanaan perusahaan. Adapun tujuan dari *Corporate Governance* ialah berikut :

1. Mengoptimalkan nilai perusahaan adalah dengan meningkatkan Prinsip akuntabilitas, dapat dipercaya, tanggung jawab, keterbukaan dan keterbukaan adil sehingga perusahaan dapat bersaing secara sehat di seluruh negeri dan secara internasional.
2. Meningkatkan pengelolaan perusahaan secara transparan dan efisien bahkan fungsi perusahaan yang profesional dan resmi dalam hal meningkatkan independensi perusahaan.
3. Mendukung direksi, direksi, bahkan pemegang saham Saham yang membuat kebijakan perusahaan didasarkan pada dengan aturan hukum yang berlaku dan moral yang luhur dan memiliki pemahaman tentang

tanggung jawab sosial perusahaan pemangku kepentingan dan lingkungan perusahaan

2.1.3.3. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Menurut Sudarmanto et al., (2021: 8) prinsip-prinsip *Corporate Governance* yang dirumuskan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) yang dibentuk berdasarkan keputusan Menko Ekuin No. KEP/31/M.EKUIIN/08/199 pada tahun 2006, yaitu berikut :

1. **Transparansi (*Transparancy*)**

Prinsip ini adalah keterbukaan informasi kepada publik proses pengambilan keputusan akurat, relevan, dan terbuka oleh pihak terkait. Sehingga aktifitas kegiatan bisnis perusahaan beroperasi secara efektif dan efisien dan melindungi kepentingan pemegang saham.

2. **Akuntabilitas (*Accountability*)**

Di prinsip akuntabilitas ini merupakan persyaratan yang diperlukan untuk mencapai kinerja perusahaan yang baik agar dapat bersaing. Prinsip akuntabilitas dapat melihat kinerja yang terukur dalam implementasinya dan evaluasi perusahaan untuk mencapai tujuan perusahaan.

3. **Pertanggungjawaban (*Responsibility*)**

Prinsip ini tidak hanya sebatas tanggung jawab kepada yang bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas antara para dewan dan

staf, serta perusahaan akan tetapi bertanggung jawab melainkan dengan bertanggung jawab kepada para pemegang saham. Sehingga perusahaan dapat mempertanggungjawabkan semua aturan-aturan yang terkait dengan hukum perusahaan yang berlaku.

4. Independensi (*Independency*)

Independensi merupakan prinsip yang meyakini bahwa kemandirian merupakan keharusan agar instansi perusahaan dapat bertugas dengan baik serta mampu membuat keputusan yang baik bagi perusahaan.

5. Keadilan (*Fairness*)

Kesetaraan sebagai prinsip yang mengharuskan adanya perlakuan yang sama terhadap semua pemegang saham, termasuk investor asing dan pemegang saham minoritas, yaitu semua pemegang saham dengan kelas yang sama harus mendapat perlakuan yang sama pula.

2.1.3.4. Implementasi *Good Corporate Governance*

Penerapan GCG diawali karena adanya masalah keagenan, dimana terdapat perbedaan persepsi antara principal (pemilik) dan *agent* (manajer). Inti dari hubungan keagenan ini adalah adanya pemisahan antara kepemilikan dan pengelolaan perusahaan. Masalah keagenan (*agency problem*) merupakan hal yang dapat timbul apabila manajer dari suatu perusahaan tidak berwenang secara penuh atas kepemilikan saham perusahaan tersebut. Pelaksanaan GCG diharapkan dapat

mengurangi permasalahan agensi yang timbul antara pemegang saham dan manajemen dengan melaksanakan lima prinsip dasar GCG.

Adapun salah satu pengukuran yang digunakan untuk mengukur GCG adalah kepemilikan manajerial, GCG yang diukur dengan kepemilikan manajerial dianggap mampu untuk mewujudkan penerapan GCG karena melihat tata kelola perusahaan dari sudut pandang internal, seperti pada pemberian saham kepada manajerial perusahaan yang akan meningkatkan motivasi kerja para manajerial yang pada akhirnya akan diikuti dengan peningkatan kinerja perusahaan.

2.1.4. Kepemilikan Manajerial

2.1.4.1. Pengertian Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah kepemilikan perusahaan oleh manajer atau dengan kata lain manajer berperan serta sebagai pemegang saham.

Marcus, Kane, dan Bodie (2018:8) menyatakan bahwa :

“Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dan kepentingan pemegang saham, sehingga akan mendapat manfaat secara langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah. Pernyataan tersebut menyatakan bahwa semakin besar proporsi kepemilikan manajerial pada perusahaan, maka manajemen cenderung lebih giat untuk kepentingan pemegang saham yang notabene adalah diri sendiri.”

Menurut Efendi dalam Syafitri et.al., (2018) juga menyatakan bahwa kepemilikan manajerial adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan pada suatu perusahaan. Sedangkan menurut Wahidahwati (2002:607) dalam Zakia et al., (2019) menyatakan bahwa :

“Kepemilikan manajerial sebagai tingkat kepemilikan saham pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan, misalnya direktur, manajemen, dan komisaris.”

Menurut Tarigan dan Christiawan (2007:2) dalam Zakia et al., (2019) pengertian kepemilikan manajerial adalah :

“Suatu kondisi dimana manajer memiliki saham perusahaan atau dengan kata lain manajer tersebut sekaligus sebagai pemegang saham perusahaan.”

Adanya kepemilikan manajerial menyebabkan manajer lebih berhati-hati dalam proses pengambilan keputusan karena mereka akan berbagi konsekuensi dari keputusan tersebut. Kepemilikan manajerial dapat menyatukan kepentingan manajemen dan pemegang saham. Melalui kepemilikan manajerial, manajemen akan bertindak untuk memuaskan kepentingan pemegang saham karena manajer memiliki risiko keuangan yang sama dengan para pemegang saham lainnya.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, kepemilikan manajerial adalah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen yang secara aktif turut ikut serta dalam pengambilan keputusan yang nantinya akan menanggung konsekuensi dari pengambilan keputusan tersebut, serta membantu menyatukan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham.

Menurut Muhammad Saifi (2019) struktur manajerial dapat dijelaskan melalui dua sudut pandang yaitu :

1. Pendekatan keagenan

Pendekatan keagenan menganggap struktur kepemilikan manajerial sebagai alat untuk mengurangi konflik keagenan diantara beberapa klaim terhadap perusahaan.

2. Pendekatan ketidakseimbangan

Pendekatan ketidakseimbangan memandang mekanisme struktur kepemilikan manajerial sebagai suatu cara untuk mengurangi ketidakseimbangan informasi antara *insider* dengan *outsider* melalui pengumpulan informasi dalam perusahaan.

2.1.4.2. Metode Pengukuran Kepemilikan Manajerial

Menurut Marcus, Kane, dan Bodie (2018:9) struktur kepemilikan manajerial dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Proporsi KM} = \frac{\text{Jumlah Saham Manajemen}}{\text{Total Saham beredar}} \times 100\%$$

Rumus di atas berfungsi untuk mengetahui persentase kepemilikan manajerial dengan membandingkan antara jumlah saham yang dimiliki manajemen dengan jumlah saham yang beredar. *Accounting Principal Board* (APB) dalam Febrina dan Hendrawaty (2023) menyatakan bahwa pemegang saham yang memiliki persentase kepemilikan saham dibawah 20% dipandang tidak memiliki pengaruh yang signifikan dalam perusahaan.

2.1.5. Pergantian Auditor

2.1.5.1. Pengertian Pergantian Auditor

Pergantian Auditor (*Auditor Switching*) menurut Sukanto et.al., (2019:77) adalah sebagai berikut :

“*Auditor switching* adalah pergantian auditor maupun kantor akuntan publik untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas serta kualitas jasa yang diberikan.”

Sedangkan, menurut Mulyadi (2011:90) *auditor switching* merupakan suatu tindakan perusahaan atau klien dalam melakukan pergantian yang bertujuan untuk menjaga independensi auditor agar tetap objektif dalam mengaudit laporan keuangan klien. Menurut Arens et.al., (2017:96) mendefinisikan *auditor switching* adalah sebagai berikut :

“*Auditor switching* adalah keputusan manajemen untuk mengganti auditornya dalam rangka mendapatkan pelayanan jasa dengan kualitas yang lebih baik.”

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diinterpretasikan bahwa *auditor switching* merupakan pergantian auditor maupun Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan (klien) untuk menjaga independensi auditor agar tetap dapat memberikan pelayanan jasa dengan kualitas yang baik dalam mengaudit laporan keuangan perusahaan.

2.1.5.2. Peraturan Mengenai Pergantian Auditor

Pada awalnya kewajiban rotasi auditor diatur dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 423/KMK.06/2002 pasal 6 yang menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk 5 (lima) tahun buku berturut-turut dan oleh seorang Akuntan Publik paling lama untuk 3 (tiga) tahun buku berturut-turut.

Kemudian pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 17/PMK.01/2008 tentang Jasa Akuntan Publik. Dalam pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa sebuah KAP hanya boleh mengaudit suatu perusahaan paling lama 6 tahun buku berturut-turut. Sedangkan untuk Akuntan Publik (AP) dalam KAP tersebut diperbolehkan mengaudit paling lama 3 tahun buku berturut-turut.

Namun pada tahun 2015, pemerintah mengeluarkan peraturan baru yang mengatur pergantian auditor, yaitu PP No. 20/2015 tentang Praktik Akuntan Publik. Dalam PP No. 20/2015 pasal 11 ayat (1) dijelaskan bahwa KAP tidak lagi dibatasi dalam melakukan audit atas suatu perusahaan. Pembatasan hanya berlaku bagi AP, yaitu selama 5 tahun buku berturut-turut. Setelah memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis terhadap suatu perusahaan selama 5 tahun buku berturut-turut AP diwajibkan melakukan *cooling-off* selama 2 (dua) tahun berturut-turut.

Setelah periode *cooling-off* selesai, maka AP dapat kembali memberikan jasa audit pada perusahaan tersebut. Perusahaan yang dimaksud dalam PP No. 20/2015

adalah industri di sektor pasar modal, bank umum, dana pensiun perusahaan asuransi/reasuransi, atau BUMN, sebagaimana dijelaskan pada pasal 11 ayat (2).

Untuk memperketat pengawasan terhadap AP yang melakukan audit terhadap perusahaan penyelenggara jasa keuangan, OJK mengeluarkan POJK Nomor 13 Tahun 2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

Dalam peraturan tersebut, diatur bahwa institusi jasa keuangan wajib membatasi penggunaan jasa audit dari AP paling lama 3 (tiga) tahun buku berturut-turut. Sedangkan pembatasan penggunaan jasa dari KAP tergantung pada hasil evaluasi Komite Audit. Selain itu, institusi jasa keuangan harus menggunakan akuntan publik dan kantor akuntan publik (KAP) yang terdaftar di OJK.

2.1.5.3. Metode Pengukuran Pergantian Auditor

Metode pengukuran variabel pergantian auditor (*auditor switching*) menurut Kusrina dan Yulivani (2016) dalam Triharyanto dan Siahaan (2021) adalah dengan menggunakan variabel *dummy*. Dimana jika perusahaan mendapatkan nilai 0 berarti perusahaan tersebut tidak melakukan pergantian auditor, namun jika perusahaan mendapat nilai 1 berarti perusahaan melakukan pergantian auditor.

2.1.6. Ruang Lingkup Kecurangan (*Fraud*)

2.1.6.1. Pengertian *Fraud*

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) mendefinisikan kecurangan (*fraud*) sebagai tindakan penipuan atau kekeliruan yang dibuat oleh

seseorang atau badan yang mengetahui bahwa kekeliruan tersebut dapat mengakibatkan beberapa manfaat yang tidak baik kepada individu atau entitas atau pihak lain (Ernst & Young, 2009).

Kecurangan merupakan suatu perbuatan dan tindakan yang dilakukan secara sengaja, sadar, tahu dan mau untuk menyalahgunakan segala sesuatu yang dimiliki secara bersama, misalnya sumber daya perusahaan dan negara demi kenikmatan pribadi dan kemudian menyajikan informasi yang salah untuk menutupi penyalahgunaan tersebut.

“Any illegal act characterized by deceit, concealment or violation of trust. These acts are not dependent upon the application of threats of violence or physical force. Fraud are perpetrated by individuals, and organization to obtain money, property or service; to avoid payment or loss of services; or to secure personal or bussines advantages.” (Tuanakotta, 2013)

Sedangkan menurut Suhayati et.al., (2013) menyatakan bahwa kecurangan adalah mengambil sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki serta melawan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain.

Menurut (Karyono, 2016) dalam *forensic fraud* mengemukakan *fraud* sebagai berikut :

“Fraud dapat juga diistilahkan sebagai kecurangan yang mengandung makna suatu penyimpangan dan perbuatan melanggar hukum (illegal act), yang dilakukan dengan sengaja untuk tujuan tertentu misalnya menipu atau memberikan gambaran keliru (mislead) kepada pihak-pihak lain, yang dilakukan oleh orang-orang baik dari dalam maupun dari luar organisasi. Kecurangan dirancang untuk mendapatkan keuntungan baik pribadi maupun kelompok yang memanfaatkan peluang-peluang secara tidak jujur, yang secara langsung maupun tidak langsung merugikan pihak lain.”

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kecurangan (*fraud*) merupakan suatu perbuatan dan tindakan melanggar hukum yang dilakukan seseorang baik dari dalam atau luar organisasi yang dilakukan secara sengaja dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi maupun kelompoknya namun di sisi lain juga merugikan pihak lain.

2.1.6.2. Jenis-Jenis Kecurangan (*Fraud*)

Menurut (Nguyen, 2008) *fraud* diklasifikasikan menjadi lima jenis yaitu diantaranya adalah :

1. *Embezzlement Employee* atau *Occupational Fraud*

Embezzlement employee atau *occupational fraud* merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh bawahan kepada atasan. Jenis *fraud* ini dilakukan bawahan dengan melakukan kecurangan pada atasannya secara langsung maupun tidak langsung.

2. *Management Fraud*

Management fraud merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh manajemen puncak kepada pemegang saham, kreditor dan pihak lain yang mengandalkan laporan keuangan. Jenis *fraud* ini dilakukan manajemen puncak dengan cara menyediakan penyajian yang keliru, biasanya pada informasi keuangan.

3. *Investment Scams*

Investment Scams merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh individu atau perorangan kepada investor. Jenis *fraud* ini dilakukan individu dengan mengelabui atau menipu investor dengan cara menanamkan uangnya dalam investasi yang salah.

4. *Vendor Fraud*

Vendor Fraud merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh organisasi atau perorangan yang menjual barang atau jasa kepada organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jenis *fraud* ini dilakukan organisasi dengan memasang harga terlalu tinggi untuk barang dan jasa atau tidak adanya pengiriman barang meskipun pembayaran telah dilakukan.

5. *Customer Fraud*

Customer fraud merupakan jenis *fraud* yang dilakukan oleh pelanggan kepada organisasi atau perusahaan yang menjual barang atau jasa. Jenis *fraud* ini dilakukan pelanggan dengan cara membohongi penjual dengan memberikan kepada pelanggan yang tidak seharusnya atau menuduh penjual memberikan lebih sedikit dari yang seharusnya.

2.1.6.3. Faktor Pemicu Kecurangan (*Fraud*)

Menurut *Oversights Systems report on Corporate Fraud 2007*, faktor pemicu terjadinya *fraud* adalah sebagai berikut :

1. Adanya tekanan untuk memenuhi kebutuhan (81%)
2. Untuk memperoleh keuntungan (72%)
3. Tidak menganggap bahwa apa yang dilakukannya adalah tindakan *fraud* (40%)

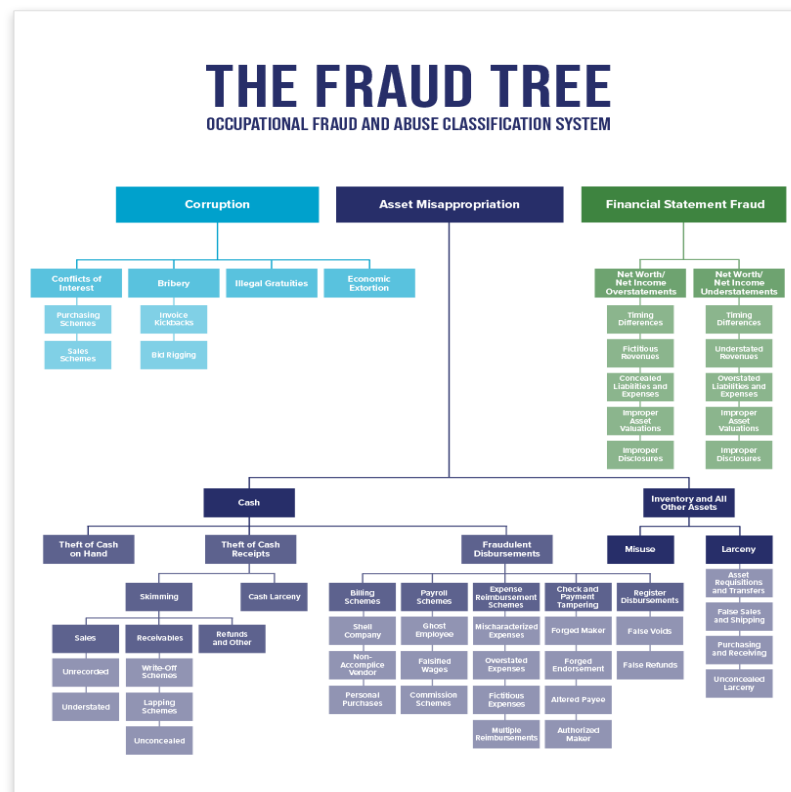
Namun, setelah melalui kajian mendalam faktor pemicu tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat yang sering disebut dengan teori GONE, yaitu :

1. *Greed* (keserakahan)
2. *Opportunity* (kesempatan)
3. *Need* (kebutuhan)
4. *Exposure* (pengungkapan)

Faktor *greed* dan *need* merupakan faktor *intern* (individu) yang berhubungan dengan individu pelaku kecurangan, sedangkan faktor *opportunity* dan *exposure* merupakan faktor generik (umum) yang berhubungan dengan organisasi sebagai korban dari perbuatan kecurangan.

2.1.6.4. Tipologi *Fraud*

Association of Certified Fraud Examiner (ACFE) 2018 membagi *fraud* kedalam tiga tipologi tindakan yang sering disebut *the fraud tree* seperti pada gambar di bawah ini :



Gambar 2.1 The Fraud Tree

Sumber : Association of Certified Fraud Examiner (ACFE).

1. Corruption

Yang banyak terjadi di negara-negara berkembang yang penegakan hukumnya lemah dan masih kurang kesadaran akan tata kelola yang baik sehingga faktor integritasnya masih dipertanyakan. *Fraud* jenis ini sering kali tidak dapat dideteksi karena para pihak yang bekerja sama menikmati keuntungan (*simbiosis mutualisme*). Termasuk didalamnya adalah penyalahgunaan wewenang atau konflik kepentingan (*conflict of interest*), penyusunan (*bribery*), penerimaan yang tidak sah

atau ilegal (*illegal gratuities*), dan pemerasan secara ekonomi (*economic extortion*)

2. *Asset Misappropriation*

Asset misappropriation meliputi penyalahgunaan/pencurian aset atau harta perusahaan atau pihak lain. Ini merupakan bentuk *fraud* yang paling mudah dideteksi karena sifatnya yang *tangible* atau dapat diukur/dihitung (*defined value*).

3. *Fraudulent Statement*

Fraudulent statements meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan.

2.1.7. *Fraudulent Financial Reporting*

Kecurangan laporan keuangan merupakan pengungkapan angka pada laporan keuangan yang tidak dinyatakan dengan yang sebenarnya guna menipu pengguna laporan keuangan (Sasongko & Wijyantika, 2019). Sedangkan, menurut *ACFE* (*Association of Certified Fraud Examiner*) definisi kecurangan laporan keuangan yaitu sebagai berikut:

“The deliberate misrepresentation of the financial condition of an enterprise accomplished through the intentional misstatement or omission of amounts or disclosures in the financial statements in order to deceive financial statement users.”

Maka, Kecurangan laporan keuangan merupakan kesengajaan ataupun kelalaian dalam laporan keuangan yang disajikan tidak sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum. Kelalaian atau kesengajaan ini sifatnya material sehingga dapat memengaruhi keputusan yang akan diambil oleh pihak yang berkepentingan.

Larum (2021) menyatakan bahwa tindakan kecurangan laporan keuangan meliputi berbagai cara seperti:

1. Memalsukan, memanipulasi atau mengubah dokumen pendukung serta catatan akuntansi dalam laporan keuangan.
2. Kelalaian atau kekeliruan yang disengaja terhadap informasi yang dijadikan sebagai sumber penyampaian laporan keuangan.
3. Penyalahgunaan prinsip terkait klasifikasi, jumlah, dan tata cara pengungkapan atau penyajian yang dilakukan dengan sengaja.

2.1.7.1. Pengukuran *Fraudulent Financial Reporting Fraud Score Model*

(F-Score)

Menurut Wahyuningtyas (2016), *fraud score model (f-score)* merupakan suatu ukuran yang ditetapkan oleh Dechow (2009) yang merupakan ukuran komplementer dan suplementer dari *discretionary accruals measure*, dan digunakan dalam mendeteksi kemungkinan *fraudulent financial reporting*.

Fraud score model (f-score) dapat menentukan standard deviasinya untuk diterapkan diberbagai negara, ataupun berbagai sektor. *Fraud score model (f-score)* ini dibangun dari penjumlahan kuantitas akrual dan kinerja keuangan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

F Score = Accrual Quality + Financial Performance

Dechow et.al., (2011) mengungkapkan bahwa *F-Score* yang mereka kembangkan memiliki kemampuan yang sangat kuat sebagai alat untuk mengukur tingkat risiko atau kecenderungan terjadinya tindakan kecurangan laporan keuangan. Menurut Skousen et.al., (2009) model *F-Score* menggunakan penjumlahan dua komponen yaitu *Accrual Quality* (kualitas akrual) yang dirpoksikan dengan RSST akrual dan *Financial Performance*.

1. Kualitas Akrual (*Accrual Quality*)

Dalam perhitungan ini basis akuntansi yang digunakan adalah basis akrual. Basis akuntansi ini merupakan dasar pencatatan akuntansi yang mewajibkan perusahaan mengakui hak dan kewajiban tanpa memperhatikan kapan kas akan diterima atau dikeluarkan.

Kemudian akrual dapat dibedakan menjadi dua yaitu ialah :

- a. *Discretionary accrual* merupakan komponen akrual hasil rekayasa manajerial dengan memanfaatkan kebebasan dan keleluasaan dalam estimasi dan pemakaian standar akuntansi.
- b. *Nondiscretionary accrual* merupakan komponen akrual yang diperoleh secara alamiah dari dasar pencatatan akrual dengan mengikuti standar akuntansi yang diterima secara umum.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa dengan basis akrual ini manajemen memiliki kesempatan untuk

memanipulasi laporan keuangan dengan menggunakan metode *discretionary accrual*. Hal ini disebabkan oleh pihak manajemen dapat secara bebas dalam mengatur dan merekayasa pencacatan laporan keuangan.

Dechow et.al., (2011) menguji kualitas model *F-Score* yang mereka kembangkan dengan cara menganalisis probabilitas prediksi yang diberikan model dalam memprediksi perusahaan yang terdapat salah saji namun tidak tertangkap oleh SEC. Nilai prediksi diperoleh dengan memasukan karakteristik masing-masing perusahaan ke dalam model dan menggunakan koefisien estimasi untuk menentukan nilai prediksi. Model yang dikembangkan membagi probabilitas dengan ekspektasi salah saji tanpa syarat untuk menghitung probabilitas nilai *F-Score*.

Menurut Qoriza & Afriyenti (2016), keandalan akrual (akrual yang rendah) merupakan penyesuaian akuntansi dengan mengakui pendapatan dan beban pada saat terjadinya dengan estimasi yang andal sehingga tidak menghasilkan cerminan kondisi yang salah sehingga menyebabkan akrual menjadi tidak andal. Semakin rendah akrual, akan semakin andal. Akrual yang tinggi dapat memicu tindakan oportunistik oleh manajemen sehingga memanipulasi penyajian informasi laporan keuangan.

Kualitas akrual ini diukur menggunakan RSST akrual (Richardson et.al., 2005) yaitu dengan menghitung semua perubahan non-kas dan

non ekuitas dalam suatu neraca perusahaan sebagai akrual dan membedakan karakteristik keandalan *working capital* (WC), *non-current operating* (NCO), dan *financial accrual* (FIN) serta komponen aset dan kewajiban dalam jenis akrual. Model perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\text{Accrual Quality (RSST)} = \frac{\Delta WC + \Delta NCO + \Delta FIN}{\text{Average Total Aset}}$$

$$WC \text{ (Working Capital)} = (\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities})$$

$$NCO \text{ (Non-Current Operating Accrual)} = (\text{Total Assets} - \text{Current Assets} - \text{Investment and Advances}) - (\text{Total Liabilities} - \text{Current Liabilities} - \text{Long Term Debt})$$

$$FIN \text{ (Financial Accrual)} = \text{Total Investment} - \text{Total Liabilities}$$

$$\text{Average Total Aset} = (\text{Beginning Total Assets} + \text{End Total Assets}) / 2$$

Menurut Richardson et.al., (2005) menjelaskan bahwa terdapat tiga aktivitas bisnis dalam klasifikasi akrual yang diperbandingkan dengan rata-rata total aset, yaitu perubahan pada modal kerja non-kas (ΔWC), perubahan pada aset operasi non lancar (ΔNCO), dan perubahan pada aset keuangan (ΔFIN). Adapun penjelasan lebih rinci dari masing-masing komponen adalah sebagai berikut :

a. *Working Capital (WC)*

Sebagian besar dari modal kerja terdiri atas akun piutang dan persediaan. Piutang dan persediaan dinilai mengandung subjektifitas yang paling tinggi (keandalan rendah).

b. *Non-Current Operating (NCO)*

NCO dijabarkan menjadi perubahan dari aset tidak lancar, tidak termasuk investasi non ekuitas jangka panjang dikurangi dengan perubahan liabilitas jangka panjang, tidak termasuk *long term debt*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa rumus ini menjelaskan perhitungan aset dan kewajiban tidak lancar setelah dikurangi investasi non ekuitas bersih jangka panjang, baik yang sifatnya *cash* maupun *accrual*. Dan *long term debt* ini menjelaskan tentang hutang jangka panjang yang berkaitan dengan investasi saja, seperti pinjaman atau investasi jangka panjang yang tercantum pada laporan posisi keuangan.

c. *Financial Accrual (FIN)*

Sebagian besar dari FIN terdiri atas investasi dan liabilitas keuangan. Perubahan investasi jangka pendek dan liabilitas keuangan dapat diukur dengan keandalan yang tinggi.

2. Kinerja Keuangan (*Financial Performance*)

Menurut Dechow et.al., (2007), *financial Performance* merupakan suatu kumpulan pengukur variabel kinerja keuangan perusahaan pada berbagai dimensi dan memeriksa apakah manajer melakukan salah saji dengan sengaja untuk menutupi keburukan kinerja perusahaan tersebut. Adapun model perhitungannya adalah sebagai berikut :

$$\mathbf{Financial\ Performance = Change\ in\ Receivable + Change\ in\ Inventories + Change\ in\ Cash\ Sales + Change\ in\ Earnings}$$

Keterangan :

$$Change\ in\ Receivable = \frac{\Delta Receivable}{Average\ Total\ Assets}$$

$$Change\ in\ Inventories = \frac{\Delta Inventories}{Average\ Total\ Assets}$$

$$Change\ in\ Cash\ Sales = \frac{\Delta Sales}{Sales\ (t)} - \frac{\Delta Receivable}{Receivable\ (t)}$$

$$Change\ in\ Earnings = \frac{Earnings\ (t)}{Average\ Total\ Assets\ (t)} - \frac{Earnings\ (t - 1)}{Average\ Total\ Assets\ (t - 1)}$$

Menurut Achmad et.al., (2012) *financial Performance* merupakan suatu set pengukuran variabel kinerja keuangan perusahaan pada berbagai dimensi dan memeriksa apakah manajer melakukan salah saji yang berdampak pada kesengajaan untuk menutupi keburukan kinerja perusahaan tersebut. Dalam mengukur *financial Performance* digunakan rumus-rumus sebagai berikut :

1. *Change in receivable*, manipulasi dari jumlah akun piutang merupakan salah satu cara sederhana yang dilakukan oleh manajer untuk menaikkan jumlah penjualan. Karena jumlah penjualan tersebut merupakan salah satu bagian yang merupakan konsentrasi investor, perubahan piutang yang cenderung terlalu tinggi dapat mengindikasikan potensi terjadinya *fraud*.
2. *Change in inventory*, tingkat perubahan persediaan suatu perusahaan dapat secara drastis mempengaruhi *gross margin*. Karena *gross margin* adalah salah satu bagian yang menjadi perhatian *stakeholders*, maka tingkat perubahan persediaan dapat menjadi suatu bukti terjadi *fraud*.
3. *Change in cash sales*, dengan mengukur perubahan hanya pada penjualan tunai, dan tidak termasuk penjualan kredit dan penjualan berbasis akrual lainnya, variabel ini dapat membantu dalam mengevaluasi apakah terjadi penurunan dalam penjualan yang tidak sesuai pada manajemen akrual.
4. *Change in earnings*, penelitian telah menunjukkan bahwa manajer cenderung lebih memilih untuk menunjukkan pertumbuhan positif pada *earnings* (Burgstahler et.al., 1997). Akrual yang tidak sebenarnya merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai pertumbuhan positif pada

earnings, walaupun kenyataannya perusahaan sedang mengalami penurunan *earnings*.

2.1.7.2. Upaya-Upaya Pencegahan *Fraudulent Financial Reporting*

Statement on Auditing Standards (SAS) No. 99 Tahun 2002 dijadikan sebagai petunjuk bagi auditor dalam mendeteksi kecurangan material dengan tekanan bahwa auditor harus menerapkan sikap skeptisisme profesional dalam auditnya dan tidak mengasumsikan bahwa manajemen selalu berlaku jujur.

Menurut Rahmatika (2020), pencegahan *fraud* dapat dilakukan dengan mengedepankan budaya kerja (*soft control*) dan pengendalian internal dan tata kelola. Budaya kerja yang sehat, jujur, terbuka, dan tolong menolong merupakan cara dalam mengedepankan pencegahan *fraud*. Budaya kerja ini dapat diterapkan dengan faktor-faktor penting sebagai berikut :

- a. *Code of Conduct* yang mudah dipahami dan dihormati oleh semua karyawan.
- b. Mempekerjakan orang-orang yang jujur dan mendidik pegawai tentang kesadaran bahaya *fraud*.
- c. Tersedianya program yang membantu masalah keuangan, psikologi, dan social pegawai.
- d. Menciptakan lingkungan kerja yang positif.

Menurut Purba (2015) dalam Afwah (2022) menjelaskan bahwa dalam melakukan pencegahan kecurangan terdapat beberapa upaya yang dapat dilakukan yaitu sebagai berikut :

a) Membangun Budaya *Anti-Fraud*

Langkah awal dalam pencegahan kecurangan adalah dengan membangun kesadaran bagi semua *stakeholder* perusahaan atau organisasi akan bahaya kecurangan. Selanjutnya, langkah-langkah pencegahan dilakukan dengan menerapkan prinsip-prinsip *good governance* dan penguatan *corporate culture* yang tidak memberi ruang toleransi untuk pelaku kecurangan. Program anti-*fraud* dapat ditempuh melalui langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Memperlihatkan teladan pimpinan (*The Tone at Top*).
- 2) Menciptakan lingkungan kerja yang positif.
- 3) Merekrut dan mempromosikan karyawan yang layak.
- 4) Konfirmasi kesehatan.

b) Penguatan Budaya *Anti-Fraud*

Metode pencegahan kecurangan dapat dengan memahami *fraud triangle* untuk mengetahui metode pencegahan kecurangan bekerja pada organisasi. Rasionalisasi dan tekanan, dua kaki segitiga *fraud*, diturunkan dari perilaku individual dan lingkungan yang sering tidak berada di bawah kendali organisasi. Kaki terakhir yaitu kesempatan dapat dikelola oleh organisasi dengan memperkuat pengendalian internal. Pencegahan kecurangan dapat dilakukan dengan menurunkan motif, membatasi kesempatan dan membatasi kemampuan pelaku kecurangan potensial untuk merasionalisasi tindakannya termasuk

menjauhkannya dari godaan. Mekanisme penguatan tersebut diantaranya sebagai berikut :

- 1) Merekrut dan mempromosikan pegawai.
- 2) Mengevaluasi program kompensasi dan kinerja.
- 3) Kewajiban mengawasi cuti tahunan secara bergilir.
- 4) Persetujuan dan proses otorisasi dengan tanda tangan dan *countersign*.

c) Penilaian Pencegahan Kecurangan

Organisasi perlu melaksanakan penilaian atas teknik-teknik pencegahan kecurangan. Penilaian pencegahan kecurangan sebaiknya menggunakan skor *fraud prevention scorecard*. *Scorecard* tersebut digunakan untuk menilai bagaimana pengendalian pencegahan kecurangan yang telah ada pada organisasi dan sebaik apa pencegahan tersebut bekerja.

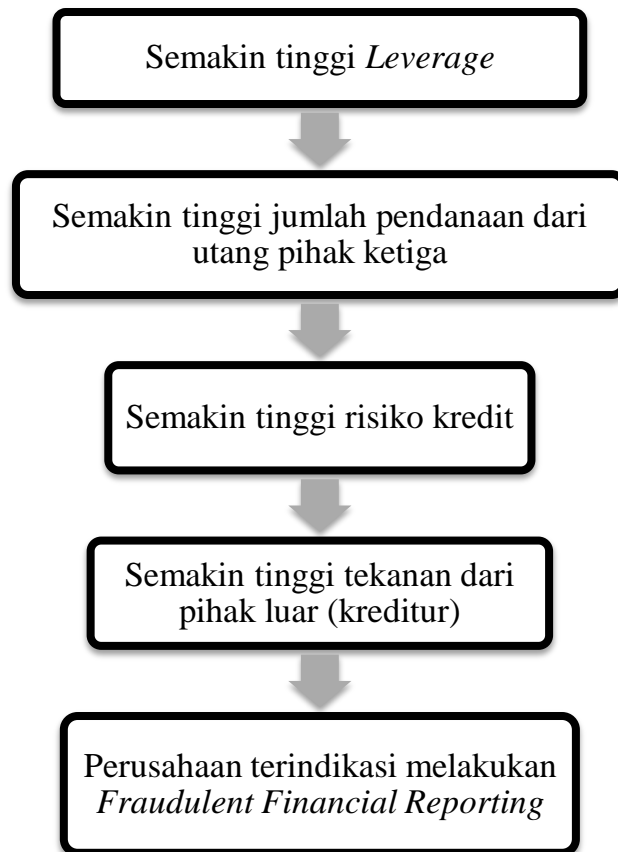
2.2. Kerangka Pemikiran

2.2.1. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

Dalam teori *triangle fraud* (SAS No. 99), rasio *leverage* berhubungan dengan tekanan secara khusus pada *external pressure* yaitu keadaan dimana perusahaan mendapat tekanan dari pihak luar perusahaan atau pihak ketiga. Rasio *leverage* yang tinggi berakibat tingginya risiko kredit. Perusahaan dengan struktur utang yang tinggi cenderung melakukan kecurangan pelaporan keuangan. Hal ini juga diungkapkan Nia (2015) dimana perusahaan dengan tingkat *leverage* yang tinggi

memungkinkan terjadinya kecurangan pelaporan keuangan karena berkurangnya tambahan pinjaman. Manajemen akan menyajikan laporan keuangan yang telah dimanipulasi apabila mereka mendapat perjanjian utang tertentu agar kondisi perusahaan terlihat baik sehingga para kreditur akan memberikan pinjaman kepada perusahaan.

Semakin tinggi risiko kredit, semakin tinggi tingkat kekhawatiran kreditur untuk memberikan pinjaman kepada perusahaan. Karenanya, perusahaan berpotensi untuk melakukan *fraudulent financial reporting* agar perusahaan dinilai baik oleh kreditur dan pihak ketiga lainnya yang akan memberikan sumber pendanaan kepada perusahaan (Agusputri & Sofie, 2019). Semakin tinggi tekanan dari pihak luar atas performa perusahaan, maka akan semakin tinggi potensi manajemen untuk melakukan *fraudulent financial reporting* untuk menunjukkan performa terbaik perusahaan. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian Milasari dan Ratmono (2019) yang menyatakan bahwa rasio *leverage* berpengaruh positif dan signifikan terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.



Gambar 2.2

Skema *Leverage* Terhadap Indikasi *Fraudulent Financial Reporting*

2.2.2. Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

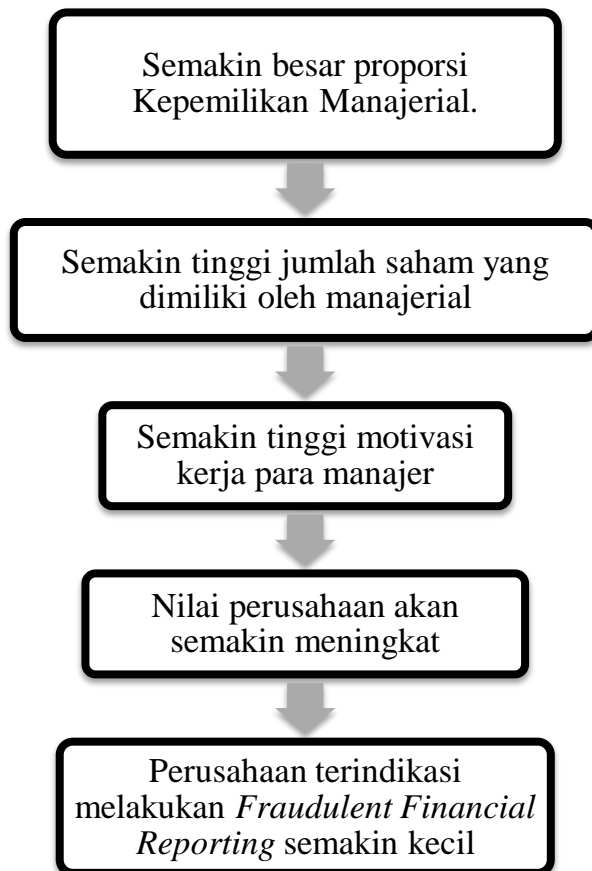
Teori agensi mengungkapkan bahwa tujuan yang berlawanan diantara prinsipal dengan agen akan mengakibatkan timbulnya konflik dan masalah agensi. Masalah agensi yang ditimbulkan dari hubungan keagenan, yaitu *moral hazard* dan *adverse selection*. *Adverse selection* disebabkan oleh adanya kesenjangan informasi yang dimiliki prinsipal dan agen. Prinsipal dapat mengambil keputusan yang salah

karena tidak memiliki informasi yang mencukupi. Oleh sebab itu, mekanisme pengawasan diperlukan untuk melindungi kepentingan prinsipal. Namun, mekanisme pengawasan menciptakan biaya tambahan yang dikenal sebagai *agency cost*. Besarnya biaya tersebut dapat dikurangi dengan penentuan struktur kepemilikan yang optimal (Zakia, 2019).

Salah satu sistem pengawasan yang dilakukan dalam rangka mencegah kecurangan laporan keuangan, yaitu melalui kepemilikan manajerial yang diukur dari persentase lembar saham manajemen perusahaan. Kepemilikan saham oleh manajemen akan memberikan dorongan pada manajemen agar membuat keputusan yang menguntungkan prinsipal karena manajer juga merupakan bagian dari pemegang saham. Tingginya kepemilikan manajerial dalam perusahaan akan membuat manajemen berusaha untuk melakukan kegiatan yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kepemilikan manajerial ini sesuai dengan pilar akuntabilitas dalam pilar *corporate governance* karena kepemilikan manajerial diadakan untuk mendorong manajer agar dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya dengan wajar dan transparan sesuai kepentingan perusahaan dengan memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan *stakeholders*.

Braley, Myers dan Marcus (2007), mengungkapkan bahwa manajer yang memiliki saham di perusahaannya akan termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka yang dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kinerja manajemen perusahaan yang meningkat akan meningkatkan permintaan investor atas saham sehingga berdampak pada kenaikan harga saham dan nilai perusahaan. Jadi, Semakin besar

tingkat kepemilikan saham oleh manajerial, maka kemungkinan terjadinya kecurangan pun semakin kecil. Karena manajer yang memiliki saham di perusahaannya akan bertindak sejalan dengan pemegang saham sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.



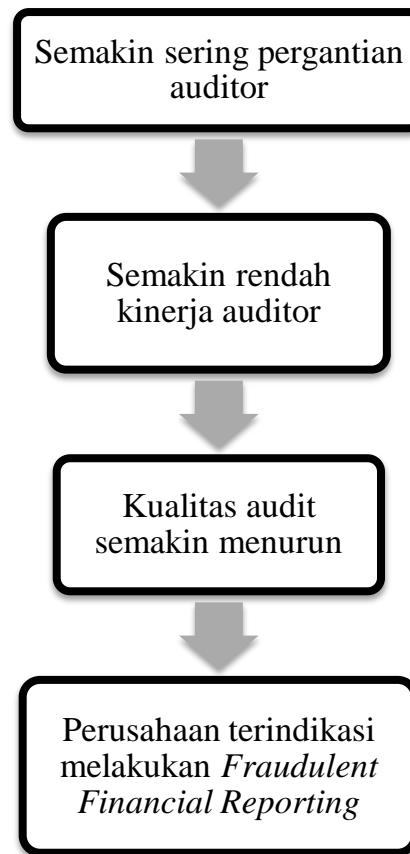
Gambar 2.3

Skema Kepemilikan Manajerial Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

2.2.3. Pengaruh Pergantian Auditor Terhadap *Fraudulent Financial Reporting*

Pergantian auditor dalam suatu perusahaan dapat dinilai sebagai cara suatu perusahaan untuk menghilangkan jejak dalam mengurangi kemungkinan terdeteksinya kecurangan dalam pelaporan keuangan yang ditemukan oleh auditor sebelumnya. Semakin sering perusahaan melakukan pergantian auditor maka dugaan adanya praktik kecurangan semakin besar pula (Pasaribu et.al., 2018). Hubungan antara auditor dan klien mampu mengurangi independensi dari auditor sehingga kemungkinan adanya auditor dapat terpengaruh dan terlalu terikat dengan klien sehingga dapat mempengaruhi kualitas audit.

Independensi yang menurun juga dapat menimbulkan keterlibatan auditor terhadap kecurangan laporan keuangan. Maka pergantian auditor dianggap berpengaruh terhadap *fraudulent financial reporting*. Menurut SAS No. 99 menyatakan bahwa adanya pergantian auditor di dalam perusahaan dapat diindikasikan adanya kecurangan (AICPA, 2002). Hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Ulfah et.al., (2017) yang menyatakan bahwa pergantian auditor berpengaruh positif terhadap *fraudulent financial reporting*.



Gambar 2.4

Skema Pergantian Auditor Terhadap Fraudulent Financial Reporting

2.3. Hasil Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1

Hasil Penelitian Terdahulu

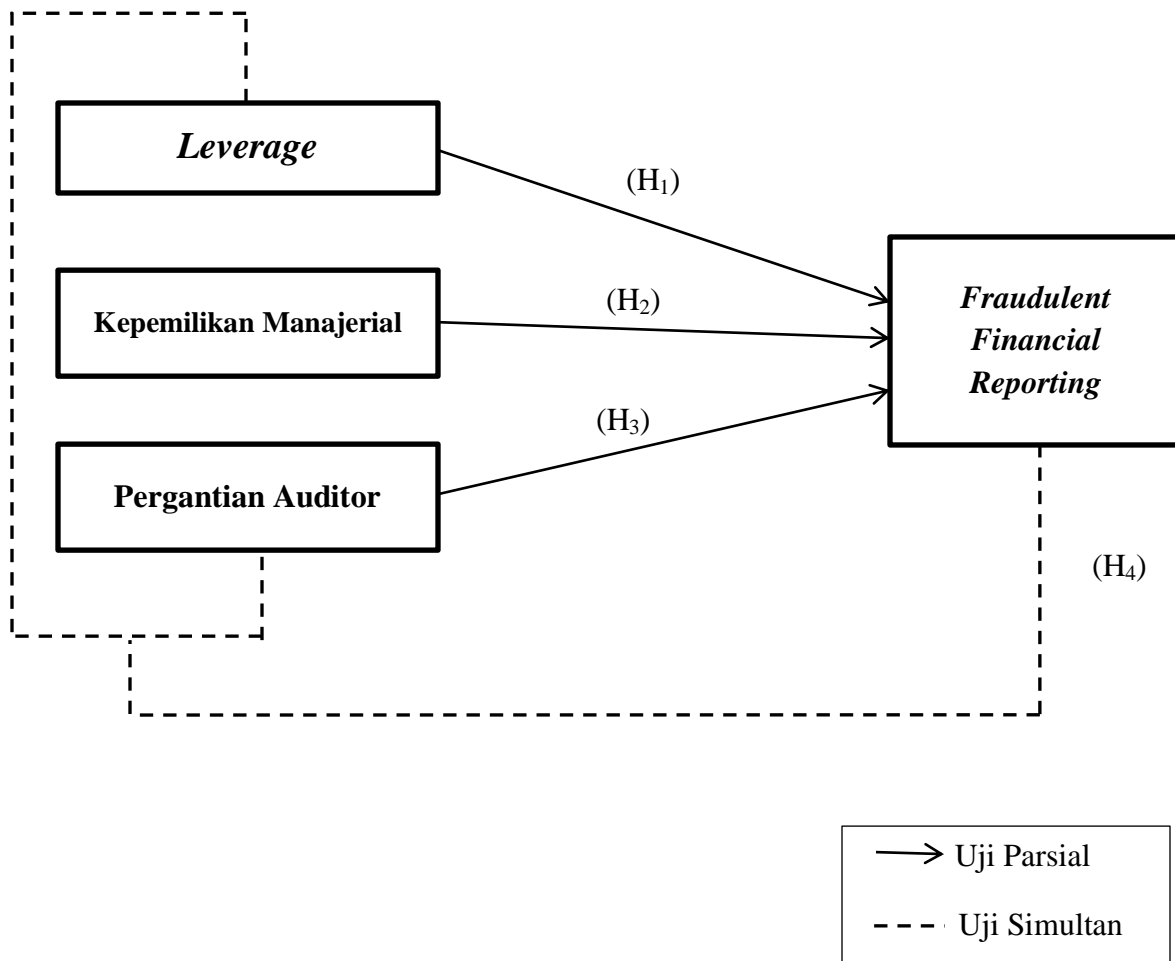
No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
1.	Veni Zakia, Nur Diana,	Pengaruh Kepemilikan	Variabel Independen (X) :	Terdapat pengaruh positif antara ukuran	Persamaan : ▪ Kepemilikan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	M. Cholid Mawardi (2019)	Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas Pertumbuhan Penjualan Terhadap Manajemen Laba Dengan <i>Good Corporate Governance</i> Sebagai Variabel Moderating	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> , Profitabilitas Pertumbuhan Penjualan Variabel Independen (Y) : Manajemen Laba Variabel Moderating (Z) : <i>Good Corporate Governance</i>	perusahaan, Profitabilitas, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Manajemen Laba Sedangkan, terdapat pengaruh negatif antara Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan <i>Leverage</i> terhadap Manajemen Laba.	Manajerial <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leverage</i> Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Ukuran Perusahaan ▪ Profitabilitas ▪ Kepemilikan Institusional ▪ Pertumbuhan Penjualan.
2.	Widyaningsih Azizah, Yetty Murni, Revina Resty Utami (2022)	Pengaruh <i>Financial Target</i> , <i>Ineffective Monitoring</i> , Pergantian Auditor,	Variabel Independen (X) : <i>Financial Target</i> , <i>Ineffective Monitoring</i> , Pergantian	Terdapat pengaruh positif antara <i>Financial Target</i> , dan Pergantian Auditor terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. Sedangkan, tidak	Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Pergantian Auditor Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Financial</i>

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
		dan Perubahan Direksi Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan	Auditor, dan Perubahan Direksi Variabel Dependen (Y) : Kecurangan Laporan Keuangan	berpengaruh secara signifikan antara <i>Ineffective monitoring</i> , dan Perubahan Direksi terhadap Kecurangan Laporan Keuangan.	<i>Target</i> <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Ineffective Monitoring</i> ▪ Perubahan Direksi ▪ Kepemilikan Manajerial ▪ <i>Leverage</i>
3.	Adelia Eka, Dirvi Surya, Hesty Ervianni, Imam Hidayat (2023)	Pengaruh <i>External Pressure</i> , <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Financial Statement Fraud</i> .	Variabel Independen (X) : <i>External Pressure</i> , <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen (Y) : <i>Financial Statement Fraud</i>	Terdapat pengaruh <i>External Pressure</i> Terhadap <i>Financial Statement Fraud</i> . Sedangkan, tidak terdapat pengaruh antara <i>Leverage</i> dan Ukuran Perusahaan terhadap <i>Financial Statement Fraud</i> .	Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>Leverage</i> ▪ <i>Financial Statement Fraud</i> Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ <i>External Pressure</i> ▪ Ukuran Perusahaan ▪ Kepemilikan Manajerial ▪ Pergantian Auditor
4.	Farrel Aprialdi, dan Koenta	Pengaruh Kepemilikan	Variabel Independen (X) :	Terdapat pengaruh Kepemilikan	Persamaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan

No	Nama Peneliti (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel yang Diteliti	Hasil Penelitian	Persamaan dan Perbedaan Penelitian
	Adji Koerniawan (2024)	Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Kecurangan Laporan Keuangan (Studi Pada Perusahaan Sektor Transportasi Dan Logistik Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017 – 2021	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Variabel Dependen (Y) : Kecurangan Laporan Keuangan.	Manajerial terhadap Kecurangan Laporan Keuangan. Sedangkan, tidak terdapat pengaruh antara Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan terhadap Kecurangan Pelaporan Keuangan.	Manajerial <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kecurangan Pelaporan Keuangan Perbedaan : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kepemilikan Institusional ▪ Ukuran Perusahaan ▪ <i>Leverage</i> ▪ Pergantian Auditor

2.4. Bagan Kerangka Pemikiran



Gambar 2.5 Bagan Kerangka Pemikiran

2.5. Hipotesis

Menurut menyatakan bahwa :

“Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah dinyatakan dalam bentuk kalimat pernyataan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru berdasarkan teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.”

Maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis merupakan gambaran atau perkiraan jawaban yang bersifat sementara atas suatu penelitian yang harus dibuktikan dengan penelitian atas fakta yang diperoleh.

Berdasarkan kajian pustaka dan kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas, maka penulis merumuskan hipotesis antara lain sebagai berikut :

H1 : *Leverage* memiliki pengaruh terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

H2 : Kepemilikan Manajerial memiliki pengaruh terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

H3 : Pergantian Auditor memiliki pengaruh terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.

H4 : *Leverage*, Kepemilikan Manajerial, dan Pergantian Auditor secara bersama-sama berpengaruh terhadap *Fraudulent Financial Reporting*.